

PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Marissa Magdalena

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ch. Heni Kurniawan

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The aim of this study was to compare the financial performance indicators in Indonesian Provincial Government, Provincial knowing who has the best performance, and to determine whether there are differences in the Indonesian province of financial performance based on indicators of independence, effectiveness, and harmony in 33 provinces in Indonesia. The data used in this study is a secondary data ie the budget statements and budget realization report from 33 provinces in Indonesia in 2010. The data is taken from (www.djpk.depkeu.go.id) and the Provincial Government Finance Statistics 2008-2011 which is a catalog of the BPS. The analysis technique used in this study is the analysis of the financial performance of the independence of the Provincial Government, the Provincial Government of the effectiveness of the financial performance, financial performance and compatibility with the provincial government public service expenditure ratio. To test the hypothesis, test different statistical instruments used are Kolmogorov Smirnov test with a significance level of 0.05. The analysis showed that the provincial government's financial performance has ranked the best performance is the province of Banten. The results of the analysis indicate that the independence of East Java Province has the highest rank is 74.93 % and West Papua has the lowest rating that is 3.69 %. The results of the analysis indicate that the effectiveness of the province of West Papua has the highest rank 167.21 % and Central Kalimantan province has the lowest rank is 71.10 %. The results of the analysis showed that the harmony of Central Java province have the officers expenditure ratio is 90.92 % and the highest value of the ratio of expenditure on public services Riau Province has the highest rank is 46.03 %. While the different test results demonstrate the value of Kolmogorov Smirnov sig asym three financial indicators have a value > 0.05 is 0.933, this means that there is no significant difference in the financial performance of the Provincial Government of Indonesia.

Keywords : *financial performance, independence, effectiveness, financial harmony provincial government*

1. Pendahuluan

Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah setelah masa orde baru ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut maka UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Hal ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000:49), bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Di sisi lain, dengan bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek pendukung yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaannya.

Adanya otonomi daerah menyebabkan tuntutan bagi setiap daerah untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan sebagai perwujudan dalam pencapaian transparansi dan akuntabilitas publik yang terjadi akibat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Peningkatan kesadaran masyarakat juga memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik, terutama yang nonprofit seperti pemerintah memang tidak mudah. Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Menurut Halim (2007:2003) penilaian tersebut menggunakan analisis rasio laporan keuangan dengan menggunakan tiga indikator (kemandirian, efektivitas, dan keserasian).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2008) dengan judul “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan”. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan obyek penelitian yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya, yaitu di 33 Provinsi di Indonesia. Alasan peneliti memilih 33 Provinsi di Indonesia sebagai obyek dalam penelitian ini adalah pada bulan April 2012, hasil dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang prestasi kinerjanya paling tinggi di Indonesia.

Menurut Dirjen Otda Djohermansyah Djohan, indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pemerintah antara lain adalah indikator kesejahteraan masyarakat, *good governance*, pelayanan dasar, dan daya saing daerah. Indikator kesejahteraan masyarakat meliputi indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Indikator *good governance* meliputi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah dengan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Motivasi peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia adalah peneliti ingin membandingkan konsistensi hasil pemeringkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dimana Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang kinerjanya terbaik di Indonesia, namun menggunakan indikator yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi penelitian terdahulu dengan obyek yang memiliki karakteristik yang berbeda dan untuk mengetahui daerah mana yang memiliki prestasi terbaik. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi setiap daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan indikator yang terbagi dalam tiga aspek yaitu kemandirian, efektivitas, dan keserasian.

2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kelompok social yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri (pusat bahasa). Pengertian lain dari otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kecuali bidang luar negeri, moneter, peradilan, keamanan, dan agama. Urusan yang telah diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999).

Tujuan otonomi daerah menurut Noordiawan dan Hertanti (2010:23), adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi daerah diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu menurut Bastian (2006) ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

2.2 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan social masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2007). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang disajikan dalam neraca sekurang-kurangnya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004:24). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 20021), yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indra Bastian (2001) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemenelemen indikator kinerja. Elemen indikator kinerja terdiri atas lima elemen, yaitu

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
3. Indikator (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Halim (2004), dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara propinsi dan kabupaten /kota.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khususnya yang merupakan unsur daerah.

Belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja rutin yang diusulkan oleh setiap penganggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh, anggaran belanja rutin meliputi belanja APBD, belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah dan perangkat lainnya (Dewi, 2006:18).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan". Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.3. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan. Menurut Harahap (1999), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah dan rasio aktivitas.

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (Pemerintah Pusat) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut "Rasio EKD") menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Susantih dan Saftiana, 2008).

c. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008).

Susantih dan Saftiana (2008) melakukan penelitian dengan judul "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan". Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kemandirian keuangan daerah, analisis efektivitas keuangan daerah, dan analisis aktivitas keuangan daerah, serta uji beda *Kolmogorof Smirnov*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 63,81 persen dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Hasil analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 50,11 persen untuk kemandirian dan 132,17 persen untuk efektivitas keuangan daerah. Selanjutnya hasil analisis aktivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terendah, yaitu 32,43 persen dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52 persen.

Sementara itu, hasil uji beda *Kolmogorof Smirnov* menunjukkan nilai asymp sig sebesar 0,859, hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hendradyadi (2011) melakukan penelitian dengan judul "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009". Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kemandirian keuangan daerah, analisis efektivitas keuangan daerah, dan analisis aktivitas keuangan daerah, serta uji beda *Paired Sample t-test* dan uji *Wilcoxon*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki peringkat tertinggi yaitu 57,35% dan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki peringkat terendah yaitu 42,30%. Hasil analisis kemandirian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki peringkat tertinggi yaitu 19,50% dan Pemerintah Kabupaten Demak memiliki peringkat terendah yaitu 5,47%. Hasil analisis efektivitas menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki peringkat tertinggi yaitu 119,82% dan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki peringkat terendah yaitu 91,16%.

Selanjutnya hasil analisis aktivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki rasio belanja pegawai terendah yaitu 52,31% dan untuk nilai rasio belanja pelayanan publik Pemerintah Kota Salatiga memiliki peringkat tertinggi yaitu 39,68%. Sementara itu hasil uji beda *Kolmogorof-Smirnov* menunjukkan nilai asymp sig tiga indikator keuangan memiliki nilai $<0,05$, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Tengah. Kurniati (2012) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dengan sesudah krisis ekonomi 2008 adalah *Paired Sample T Test* untuk data yang berdistribusi normal. Apabila data yang tidak terdistribusi normal menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam bentuk efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, aktivitas keuangan daerah dan kontribusi pendapatan asli daerah (pajak daerah) sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian keuangan daerah dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah (retribusi daerah).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan studi empiris. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda. Dalam penelitian ini, obyek yang akan diteliti adalah propinsi di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dari 33 Provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode *non probability sampling*, berupa *Purposive Sampling*. Purposive Sampling (Pengambilan sampel bertujuan) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2007). Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah :

1. Laporan keuangan daerah berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD yang dipublikasikan oleh setiap daerah.
2. Terdapat indikator kinerja meliputi kemandirian, efektivitas, dan keserasian.
3. Data dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2008-2011 yang merupakan katalog dari BPS.

Sesuai dengan kriteria tersebut maka dipilihlah Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD di 33 Provinsi yang ada di Indonesia sebagai sampel dalam penelitian ini.

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan diteliti meliputi tiga indikator, yaitu kemandirian, efektivitas, dan keserasian kinerja keuangan pemerintah Provinsi tahun 2010.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\boxed{\mu_1} \neq \boxed{\mu_2} \neq \dots\dots\dots \boxed{\mu_{33}}$$

Keterangan :

μ_1 = Kinerja keuangan daerah di Aceh tahun 2010

μ_2 = Kinerja keuangan daerah di Sumatera Utara tahun 2010

- μ_3 = Kinerja keuangan daerah di Sumatera Barat tahun 2010
- μ_4 = Kinerja keuangan daerah di Riau tahun 2010
- μ_5 = Kinerja keuangan daerah di Jambi tahun 2010
- μ_6 = Kinerja keuangan daerah di Sumatera Selatan tahun 2010
- μ_7 = Kinerja keuangan daerah di Bengkulu tahun 2010
- μ_8 = Kinerja keuangan daerah di Lampung tahun 2010
- μ_9 = Kinerja keuangan daerah di Bangka Belitung tahun 2010
- μ_{10} = Kinerja keuangan daerah di Kepulauan Riau tahun 2010
- μ_{11} = Kinerja keuangan daerah di DKI Jakarta tahun 2010
- μ_{12} = Kinerja keuangan daerah di Jawa Barat tahun 2010
- μ_{13} = Kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah tahun 2010
- μ_{14} = Kinerja keuangan daerah di DI Yogyakarta tahun 2010
- μ_{15} = Kinerja keuangan daerah di Jawa Timur tahun 2010
- μ_{16} = Kinerja keuangan daerah di Banten tahun 2010
- μ_{17} = Kinerja keuangan daerah di Bali tahun 2010
- μ_{18} = Kinerja keuangan daerah di Nusa Tenggara Barat tahun 2010
- μ_{19} = Kinerja keuangan daerah di Nusa Tenggara Timur tahun 2010
- μ_{20} = Kinerja keuangan daerah di Kalimantan Barat tahun 2010
- μ_{21} = Kinerja keuangan daerah di Kalimantan Tengah tahun 2010
- μ_{22} = Kinerja keuangan daerah di Kalimantan Selatan tahun 2010
- μ_{23} = Kinerja keuangan daerah di Kalimantan Timur tahun 2010
- μ_{24} = Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Utara tahun 2010
- μ_{25} = Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Tengah tahun 2010
- μ_{26} = Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Selatan tahun 2010
- μ_{27} = Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Tenggara tahun 2010
- μ_{28} = Kinerja keuangan daerah di Gorontalo tahun 2010
- μ_{29} = Kinerja keuangan daerah di Sulawesi Barat tahun 2010
- μ_{30} = Kinerja keuangan daerah di Maluku tahun 2010
- μ_{31} = Kinerja keuangan daerah di Maluku Utara tahun 2010
- μ_{32} = Kinerja keuangan daerah di Papua Barat tahun 2010
- μ_{33} = Kinerja keuangan daerah di Papua tahun 2010

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari basis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan strategi arsip untuk mendapatkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dari basis data. Data arsip sekunder yang digunakan berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010. Penggunaan data arsip sekunder karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini diteliti berdasar pada Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2010, sehingga peneliti tidak memerlukan verifikasi dan pengelompokan lagi.

Penelitian ini menggunakan uji beda pada penelitian ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. *Kolmogorov Smirnov* dilakukan untuk uji beda dengan satu sampel. Pada penelitian

ini *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Menurut Sugianto (2007:318), dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* adalah jika hasil nilai *asympt sig* (*asymptotic significance*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak, sebaliknya jika *asympt sig* hasil pengujian kurang dari 0,05 maka H_0 diterima.

4. Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010. Laporan keuangan yang digunakan berupa Laporan APBD dari 33 Provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Laporan Realisasi APBD dari 33 Provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2008-2011 yang merupakan katalog dari Badan Pusat Statistik (BPS). Elemen yang digunakan dalam Laporan APBD adalah Target Penerimaan PAD, sedangkan elemen dalam Laporan Realisasi APBD yang digunakan meliputi Total Pendapatan Daerah, Realisasi Penerimaan PAD, Total Belanja Daerah dan Total Belanja Pelayanan Publik (Belanja Modal).

4.1. Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kemandirian keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010 (terlampir), dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai kemandirian dengan peringkat tertinggi diantara 33 Provinsi di Indonesia, dengan presentase 74,93%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD di Provinsi Jawa Timur mampu memberikan kontribusi yang paling besar bagi total pendapatan daerahnya dibandingkan dengan 32 Provinsi lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Provinsi yang memiliki nilai kemandirian dengan peringkat paling rendah adalah Provinsi Papua Barat, dengan presentase sebesar 3,69%. Hal ini dinilai wajar jika dibandingkan dengan 32 Provinsi lainnya karena kontribusi PAD Provinsi Papua Barat terhadap total pendapatan daerah yang relative kecil.

4.2. Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil perhitungan nilai efektivitas keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010 (terlampir), dapat diketahui bahwa Provinsi Papua Barat memiliki nilai efektivitas dengan peringkat tertinggi diantara 33 Provinsi di Indonesia, dengan presentase 167,21%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Provinsi Papua Barat dalam merealisasikan pencapaian PAD melebihi dari target penerimaan PAD yang dianggarkan. Sebagai Provinsi yang tergolong efektivitas paling tinggi, Provinsi Papua Barat juga menunjukkan kemampuannya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Provinsi yang memiliki nilai efektivitas dengan peringkat paling

rendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan presentase sebesar 71,10%. Hal ini dinilai wajar jika dibandingkan dengan 32 Provinsi lainnya karena realisasi pencapaian PAD Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melebihi target penerimaan PAD yang dianggarkan.

4.3. Keserasian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

a. Belanja Aparatur Daerah Terhadap APBD

Berdasarkan hasil perhitungan nilai keserasian belanja aparatur daerah terhadap APBD keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010 (terlampir), dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai keserasian belanja aparatur daerah terhadap APBD dengan peringkat paling tinggi diantara 33 Provinsi di Indonesia, dengan presentase 90,92%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin (belanja aparatur daerah) dibanding untuk belanja pelayanan publik.

b. Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD

Berdasarkan hasil perhitungan nilai keserasian belanja pelayanan publik terhadap APBD keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010 (terlampir), dapat diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki nilai keserasian belanja pelayanan publik terhadap APBD dengan peringkat tertinggi diantara 33 Provinsi di Indonesia, dengan presentase 46,03%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah Provinsi Riau paling banyak digunakan untuk belanja pelayanan publik, sehingga alokasi dana yang diperoleh untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat juga semakin tinggi.

4.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga indikator yaitu kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, dan keserasian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini rasio keserasian yang terbagi menjadi 2, yaitu belanja aparatur daerah terhadap APBD dan belanja pelayanan publik terhadap APBD. Dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa ke-33 Provinsi tersebut masih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dibanding alokasi pada belanja pelayanan publik. Namun demikian, sebagai daerah di negara yang mempunyai visi menciptakan pemerintahan yang *good government governace*, peranan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik harus selalu diupayakan. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menilai prestasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan kinerja tahun 2010 dan yang sesuai dengan visi pemerintahan yang *good government governance*, maka indikator yang digunakan adalah indikator kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten berada di peringkat pertama kinerja keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2010 berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik terhadap APBD. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut maka

motivasi dari penelitian ini dapat terjawab, dimana hasil konsekuensi pemeringkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang kinerjanya terbaik di Indonesia tidak konsekuensi dengan hasil pemeringkatan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2010 dengan indikator kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik terhadap APBD. Perbedaan hasil pemeringkatan kinerja terbaik tahun 2010 antara LPPD dengan analisis rasio keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik terhadap APBD diakibatkan oleh perbedaan karakteristik dari indikator yang digunakan.

4.5. Uji Hipotesis Non Parametrik

a. Uji Beda – *Kolmogorov Smirnov*

Pada penelitian ini *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat sebagai berikut:

Uji *Kolmogorov Smirnov*

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Total	33	49.55	14.908	13	82

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Total
N		33
Normal Parameters(a,b)	Mean	49.55
	Std. Deviation	14.908
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.539
Asymp. Sig. (2-tailed)		.933

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji beda Kolmogorov Smirnov di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai *asympt sig* adalah sebesar 0,933. Pada penelitian ini nilai *asympt sig* lebih dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Ketiga indikator tersebut meliputi kemandirian, efektivitas, dan keserasian. Kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara Target PAD dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah. Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi diukur dengan perbandingan antara Realisasi PAD dengan Target PAD. Keserasian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi adalah rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD yang diukur dengan perbandingan antara belanja pelayanan publik terhadap APBD dengan Realisasi Total Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing rasio (kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik) terhadap 33 Provinsi yang ada di Indonesia, maka dapat diperoleh total peringkat dari ketiga rasio tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis uji beda *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian *Kolmogorov Smirnov* bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Menurut Sugianto (2007), dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* adalah jika hasil nilai *asympt sig* (*asymptotic significance*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak, sebaliknya jika *asympt sig* hasil pengujian kurang dari 0,05 maka H_0 diterima.

Hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai *asympt sig* adalah sebesar 0,933. Pada penelitian ini nilai *asympt sig* lebih dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung penelitian Susantih dan Saftiana (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

5. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia, mengetahui Provinsi yang memiliki prestasi terbaik, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan keserasian pada 33 Provinsi di Indonesia. Hasil analisis kemandirian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peringkat tertinggi yaitu 74,93% dan Provinsi Papua Barat memiliki peringkat terendah yaitu 3,69%. Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki peringkat tertinggi yaitu 167,21% dan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peringkat terendah yaitu 71,10%. Hasil analisis keserasian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah tertinggi yaitu 90,92% dan untuk nilai rasio belanja pelayanan publik Provinsi Riau memiliki peringkat tertinggi yaitu 46,03%.

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dengan 3 indikator menunjukkan bahwa Provinsi yang memiliki peringkat kinerja terbaik adalah Provinsi Banten. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeringkatan yang dilakukan oleh Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 tidak konsisten dengan hasil pemeringkatan dengan tiga indikator kinerja (kemandirian, efektivitas, dan belanja pelayanan publik). Hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *asym sig* tiga indikator keuangan memiliki nilai $> 0,05$ yaitu 0,933, hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa 33 Provinsi di Indonesia mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu Provinsi dengan Provinsi yang lain.

Keterbatasan penelitian ini terkait dengan tahun pemeringkatan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peneliti memutuskan untuk menggunakan data tahun 2010 karena hasil pereringkatan berdasarkan LKPD yang terbaru adalah tahun 2010. Peneliti merekomendasikan bagi penelitian berikutnya untuk menggunakan data LKPD yang lebih baru dari tahun 2010 sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih terkini. Selain itu, untuk penelitian berikutnya sebaiknya menambah jumlah indikator yang akan digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Daftar Referensi

- Bastian, Indra. (2001). *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba empat.
- Dewi, Adha. (2006). *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang*. Skripsi Yogyakarta: UII,. Tidak dipublikasikan.
- Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu. (2000). *Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok*. Kritis, Vol. XII, No. 3,1-53
- Erawati, Ni Made Adi. (2012). *Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan SARBAGITA*. Skripsi Universitas Udayana, Bali.
- Halim, Abdul. (2002). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat..
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2007). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. (1999), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendriyadi, Sigit. (2011). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Semarang : UNDIP. Skripsi. Tidak dipublikasikan.

- Jogiyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kurniati, Siti. (2012). *Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan sesudah Krisis Ekonomi 2008*. UNDIP, Semarang. Skripsi. Tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Noordiawan, Deddi dan Noordiawan, Hertanti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. (2008). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. Sumatera Selatan: UNSRI. Tesis PPS. Tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 1974, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 1999, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2012, pukul 12.08 WIB.
- <http://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/perbandingan-indikator-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-se-sumatra-bag-selatan.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2012, pukul 13.32 WIB.
- www.bps.go.id , diakses pada tanggal 20 Agustus 2012, pukul 22.15 WIB.
- www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2012, pukul 23.52 WIB.
- www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 18 Agustus 2012, pukul 13.45 WIB.